



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



***BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BONE***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Bappeda Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda. Komitmen dalam penyusunan LKj Bappeda, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Bappeda Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Bappeda. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Bappeda pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Bappeda Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai

pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Bappeda Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 19 Februari 2019

Kepala Bappeda



Drs. H. ABU BAKAR, MM

Pangkat * : Pembina Utama Muda

NIP : 19610624 198603 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.2 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Gambaran Umum Organisasi	7
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Komposisi SDM Organisasi	10
1.6 Isu Strategis	12
1.7 Inovasi Pelayanan Publik	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
Rencana Strategis	14
2.1 Visi dan Misi	14
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	14
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	15
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	17
Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Rencana Anggaran Tahun 2018	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
Capaian Indikator Kinerja Utama 2018	23
Perbandingan Capaian Kinerja	24
a. Perbandingan Antara target dan Realisasi tahun 2018	25
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun 2015-2016	27
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	29

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Pencapaian Kinerja Lainnya	30
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	
Daftar Tabel	
Tabel 2.1 SDM Bappeda berdasarkan urutan kepangkatan Gol. ruang	12
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator kinerja Bappeda	15
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda	15
Tabel 2.4 Program untuk mencapai sasaran	16
Tabel 2.5 IKU 2018	19
Tabel 2.6 IKU 2019	20
Tabel 2.7 Rencana Anggaran tahun 2018	21
Tabel 2.8 Alokasi Persasaran Tahun 2018	22
Tabel 3.1 Skala pengukuran ordinal	23
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator sasaran bappeda tahun 2018	23
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Bappeda tahun 2018	24
Tabel 3.4 Persentase kategori pencapaian indikator sasaran	25
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	26
Tabel 3.6 Perkembangan capaian indikator kinerja 1	26
Tabel 3.7 Perkembangan capaian indikator kinerja 2	26
Daftar Gambar	
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone	9
Daftar Grafik	
Grafik 1. SDM Bappeda berdasarkan Jabatan.	10
2. SDM Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Bappeda LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi

dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKj Bappeda merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Bappeda merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda

Pembentukan SKPD Bappeda tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda. Tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Bappeda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi Bappeda

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- 
- a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. Melaksanakan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Bappeda memiliki susunan organisasi sebagai berikut

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

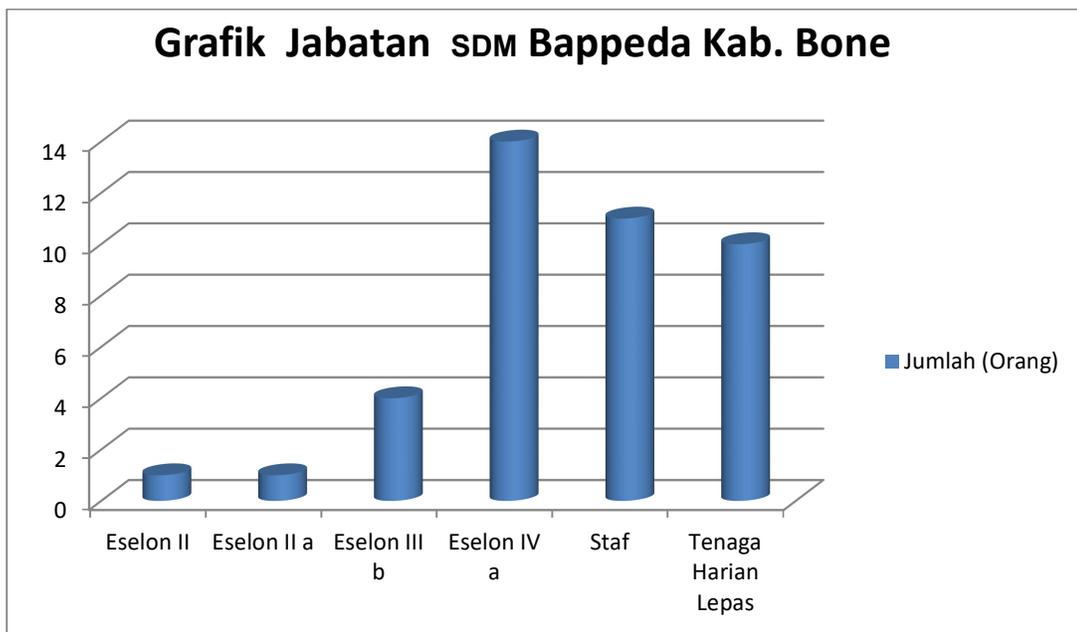
Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Bappeda sebagai berikut :

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Bappeda Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023.

1.5 Komposisi SDM Organisasi

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan

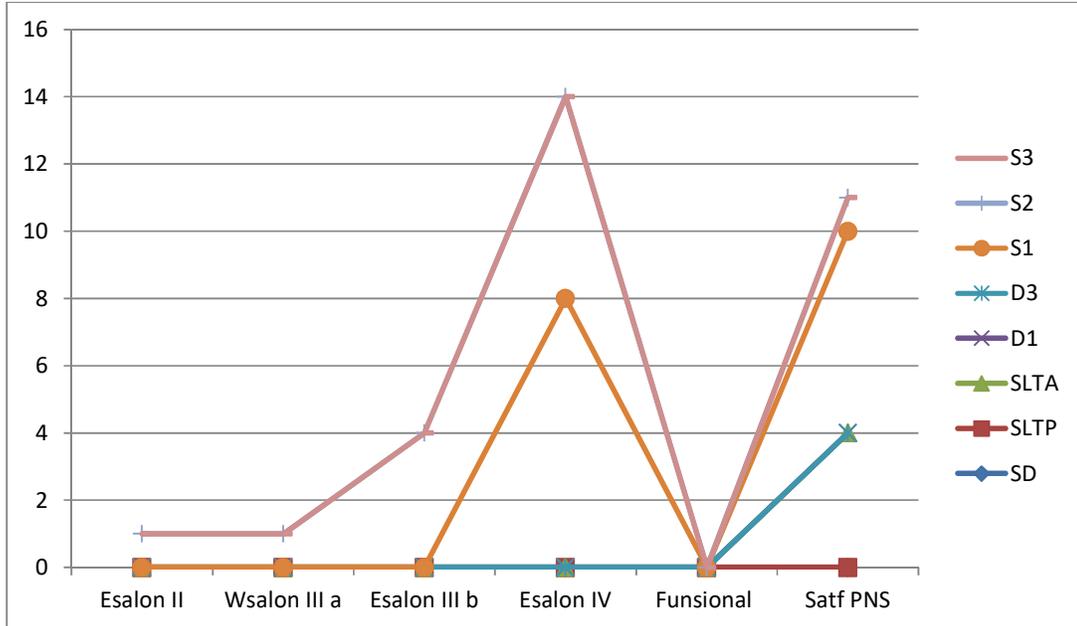


Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi jabatan esalon II dan III a masing-masing berjumlah 1 orang dan untuk esalon III b berjumlah 4 orang, jumlah esalon IV sebanyak 14 orang dan staf serta tenaga harian lepas masing-masing berjumlah 11 orang dan 10 orang.

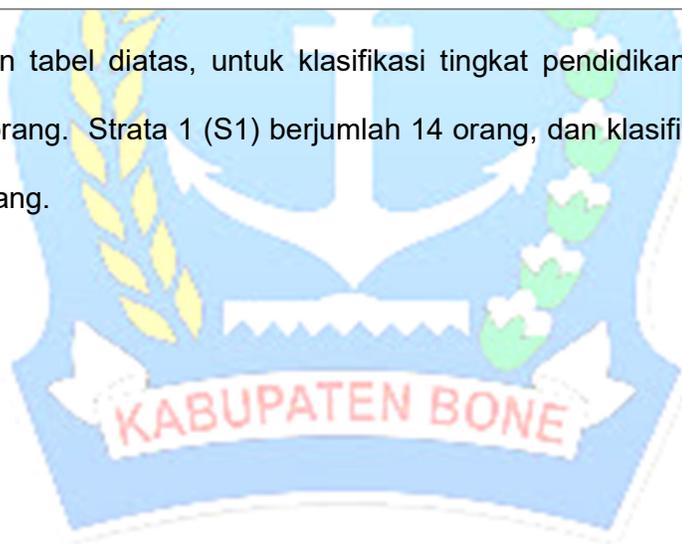
Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan tabel diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 13 orang. Strata 1 (S1) berjumlah 14 orang, dan klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang.



Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kabupaten Bone Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Kepangkatan, Golongan/Ruang

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata Tingkat I	III/d	8
5	Penata	III/c	4
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	-
9	Pengatur	II/c	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
11	Pengatur Muda	II/a	0
12	Juru Tingkat I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
15	Juru Muda	I/a	-
J u m l a h			31

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari totak keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang dari total pegawai sebanyak 33 orang.

1.6 ISU STRATEGI

Isu Strategis yang dihadapi Bappeda yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

2. Masih Kurangnya Data yang dibutuhkan untuk perencanaan.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.
4. Masih kurangnya koordinasi antar bidang.
5. Belum adanya system dan prosedur kerja yang memadai.

1.7 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, penyusunan dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan spesifik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara sistematis rumusan Misi Bappeda sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan dan SDM administratif;
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana gedung (ruang) dan sarana kerja;
3. Meningkatkan kualitas manajemen operasional lembaga;
4. Meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan yang memenuhi kaidah politis, teknokratis, partisipatif, *bottom up* dan *topdown*;
5. Meningkatkan kualitas substansi perencanaan memenuhi kaidah konsisten dan terukur serta sinergis antar sektor;
6. Menyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaan-perencanaan afirmatif lainnya;
7. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid, reliable dan uptodate.

2.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) Bappeda Kabupaten Bone yang didasarkan pada Misi adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTR A
Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan Aplikatif	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase Ringkasan Kebijakan bidang perencanaan pembangunan sektoral yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	%	80	85

2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat	%	50	80
Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	%	80	85
Meningkatnya perencanaan Pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan Aplikatif	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	70%	80%
Meningkatnya ketersediaan	Persentase	%	80	85

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Ringkasan Kebijakan bidang perencanaan pembangunan sektoral yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan			

2.4 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program Untuk Pencapaian Sasaran Bappeda Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur Peningkatan Disiplin Apratur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif	Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Bappeda telah menetapkan PK sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat	%	80
2	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	%	85
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	85
4	Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase Ringkasan Kebijakan bidang perencanaan pembangunan sektoral yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	%	85



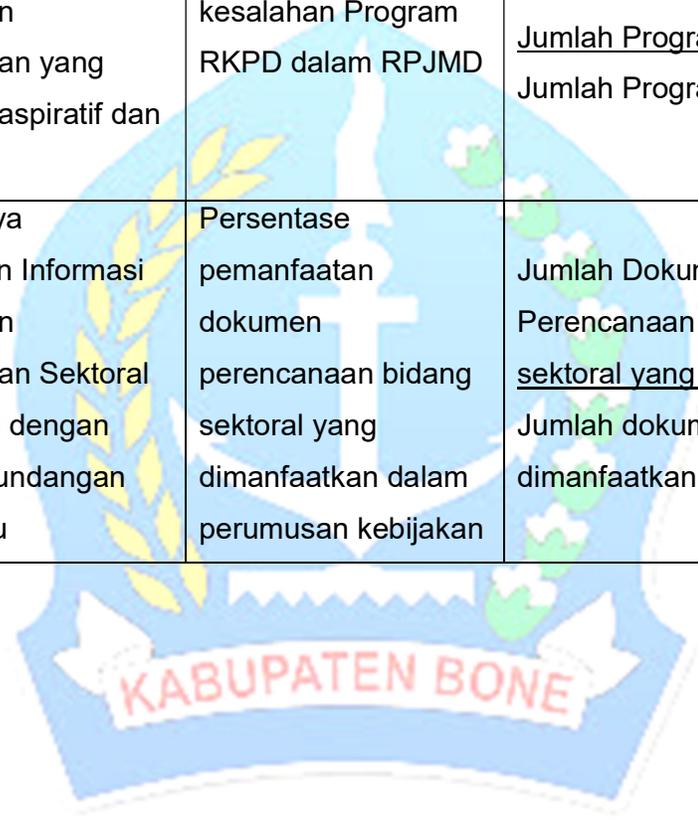
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pada awal tahun 2018 Bappeda telah menetapkan IKU sebagai berikut

Tabel 2.5

IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian target Kinerja
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.	Presentase Tingkat kesalahan Program RKPD dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program dan RKP}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektoral yang Sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan bidang sektoral yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan sektoral yang tersedia}}{\text{Jumlah dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan}} \times 100\%$



Tabel 2.6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja RKPD yang sesuai RPJMD	Persentase Kesesuaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja RKPD yang sesuai RPJMD}}{\text{Jumlah Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD}} \times 100\%$	Dokumen RKPD Dokumen RPJMD	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Persentase Usulan Musrebang yang Diakomodir Dalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Usulan Prioritas Musrebang yang Akomodir}}{\text{Jumlah Usulan Musrebang}} \times 100\%$	Usulan Musrebang, RKPD	
2	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektoral dalam menunjang perumusan kebijakan	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi,
	perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Bidang Sosbud}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan Bidang Sosbud	Bidang Sosbud

	Sosial Budaya dengan RPJMD			
	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastwil dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastwil}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100\%$	Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur

IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 6.932.504.561,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Rencana Belanja Bappeda TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.564.344.561,00	36,99
2	Belanja Langsung	3.300.000.000,00	63,01
Jumlah		6.932.504.561,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan SDM Perencana yang bersertifikat	126.510.000,-	3.83 %

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	715.340.000,-	21,67%
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif	Persentase Penjabaran RPJMD kedalam RKPD	892.300.000,-	27,03 %
Meningkatnya ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang sektoral yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Dokumen perencanaan pembangunan bidang sektoral yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	1.319.249.000,-	39,97%
TOTAL		3.300.000.000,-	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/ kegiatan sebesar Rp. 3.300.000.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran terwujudnya Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas besaran 39,97 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran yaitu Meningkatnya perencanaan pembangunan yang,berkualitas, aspiratif, dan aplikatif sebesar 27,03%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran terwujudnya kenyamanan kerja dan hubungan antar personal yang semakin baik, meningkatnya efektifitas kerja, meningkatnya efisiensi sumber daya sebesar 0,007 % dari total anggaran belanja langsung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Bappeda telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran. Dimana setiap sasaran terdapat 1 indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Baik = 100 %
2	Terpenuhinya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	1	Baik = 100%
3	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	1	Baik = 80%
4	Meningkatnya ketersediaan Dokumen Pembangunan Sektoral yang Berkualitas .	1	Baik = 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Persentase Tingkat Keselarasan Program RKPD kedalam RPJMD	338	253 Program	74%
Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase Pemanfaatan Dokumen perencanaan pembangunan bidang sektoral yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	9 Dok	8 Dok	75%

Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Bappeda dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Cukup	1	74 %
	Jumlah	1	74 %
Sasaran 2			
1.	Baik	1	85 %
	Jumlah	1	85 %

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, diketahui bahwa rata-rata indikator mencapai nilai interval antara 74 – 100 % dengan predikat baik.

3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Bappeda tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Bappeda dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 1: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Tingkat Keselarasan Program RKPD kedalam RPJMD	338 Program	253 Program	74 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dengan capaian realisasi *sebanyak 253 Program* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 74 % dari target 100 % . Dengan persentase 74 % Capaian ini dikategorikan Baik.

Penyusunan Rancangan RPJMD, dengan output kegiatan adalah dokumen RPJMD dan Perubahannya, termasuk Perubahan RPJPD. Kedua dokumen ini menjadi rujukan dan acuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perencanaan daerah baik yang berskala kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan

Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dengan output kegiatan adalah dokumen RKPD yang disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai bentuk penjabaran tahunan dari RPJMD dan acuan penyusunan Renja SKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan output kegiatan dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK), Daftar Prioritas Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan, Daftar Kegiatan untuk bahan Forum SKPD dan Input Data bahan pembahasan Musrenbang Provinsi dan *E-Planning*.

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan di 27 (duapuluh tujuh) kecamatan sampai pelaksanaan pada tingkat kabupaten termasuk Forum SKPD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Musrenbang Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi

Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone dan perubahannya setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone paling lambat bulan Mei tahun berjalan

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Pemanfaatan Dokumen perencanaan pembangunan bidang sektoral yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	9 Dok	8 Dok	85 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan Ekonomi, Dokumen Perencanaan Sosial Budaya, Dokumen Perencanaan Infrastruktur Wilayah diarahkan untuk mendukung akselerasi pencapaian target RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-

2018 yaitu peningkatan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penting adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan PDRB dalam rangka kesejahteraan Masyarakat.

Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya diarahkan untuk mendukung akselerasi pencapaian target RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 yaitu peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penting adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Daya Beli Riil Masyarakat. Hasil yang telah dicapai dalam mendukung target pemerintah daerah Tahun 2013-2018 antara lain: Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013 sebesar 61,40 meningkat menjadi 63,86 tahun 2017, Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2013 sebesar 11,85 tahun menjadi 12,42 tahun 2018 Peningkatan Daya Beli Riil Masyarakat tahun 2013 sebesar Rp. 7.785.000/kapita/tahun menjadi Rp. 8.275.000,-/kapita/tahun, Angka Harapan Hidup Tahun 2013 sebesar 65,76 tahun menjadi 66,12 tahun pada tahun 2018. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 5,91 tahun menjadi 6,72 tahun 2018. Tahun 2015 Kabupaten Bone menjadi kategori Kabupaten Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda.

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah diarahkan untuk pengambilan kebijakan arah pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pada tahun 2018 bidang Sarana dan Prasarana Wilayah menyusun 2 (dua) dokumen diantaranya PSETK (Profil Sosial Ekonomi dan Teknis Kelembagaan dan EHRA (Environmental High Risk Analisis)

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2015	2016	2017
a.	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	73 %	74 %	74 %

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 74 % .dari target 80% mengalami peningkatan tahun 2015, 2016, 2017. Adapun target capaian diakhir renstra tidak tercapai 80% , hal ini disebabkan karena jumlah anggaran APBD Kabupaten Bone tidak mampu memenuhi seluruh target yang ada didokumen RPJMD.

Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Bone melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga target indikator Tahun 2018 dapat tercapai sebesar 100%,. Tahapan penting penyusunan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2018 : Rancangan Awal
a. Analisis teknokratis (arah kebijakan pembangunan daerah) RKPD Rancangan RKPDdes/Usulan Musrenbangcam
b. Musrenbang Desa/Kelurahan Usulan program/kegiatan
c. Musrenbang RKPD di Kecamatan (Musrenbangcam) RKPD (bottom up) Rancangan Akhir Renja SKPD. Forum SKPD Rancangan Akhir RKPD. Musrenbang Kabupaten.

Tabel 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sektoral yang dimanfaatkan Bupati dalam Perumusan Kebijakan	7 Dok	7 Dok	8 Dok

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Terpenuhinya persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sektoral yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan dengan realisasi 100% dari target 85%. Telah tercapai 100%, Ringkasan Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut

Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi antara lain : Master Plan Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan/ P2KP, dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya antara lain : dokumen SPKD, LP2KD, ASIA HAM, dan beberapa dokumen lainnya.

Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam antara lain : Buku Putih Sanitasi, Kawasan Strategis Kabupaten, PPSP, dan beberapa dokumen lainnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone, Bappeda banyak kendala yang dihadapi diantaranya jumlah dan penempatan pegawai di Bappeda masih belum optimal serta belum sesuai dengan bidang keahliannya, ketersediaan peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang saat ini dilaksanakan belum optimal. Hal ini adalah penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Bappeda Kab. Bone. Dalam konteks ini, Bappeda telah mengambil langkah langkah yang patut dilakukan diantaranya memberdayakan personil yang jumlahnya masih sangat terbatas dengan bekerjasama dan berkoordinasi, memanfaatkan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan telah dilakukan secara rutin dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan rencana yang terorganisir sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketepatan waktu dan tepat sasaran. Selain itu perlu adanya langkah langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di tahun mendatang yaitu menambah personil yang selama masih sangat terbatas, anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan, pemenuhan peralatan pendukung yang masih terbatas, koordinasi dilakukan secara rutin dan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara

terorganisir sehingga pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan sesuai harapan.

- **Permasalahan**

- 1) Masih rendahnya komitmen penentu kebijakan tingkat SKPD dalam mendukung program prioritas daerah.
- 2) Belum optimalnya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan target pencapaian IPM Kabupaten Bone
- 3) Belum terpadunya sistem perencanaan dan penganggaran antar SKPD dalam mendukung program/kegiatan prioritas daerah terutama peningkatan IPM Kabupaten Bone.
- 4) Inkonsistensi penggunaan dokumen perencanaan sebagai rujukan prioritas program dan kegiatan SKPD
- 5) Penguatan database daerah belum optimal .
- 6) Komitmen pemamfaatan data dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran belum maksimal.
- 7) Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pemabngunan desa/kel.
- 8) Tools Monitoring dan evaluasi belum ada yang disepakati bersama.
- 9) Belum terbangun sistem aplikasi database daerah
- 10) Belum optimalnya pendampingan di tingkat desa dalam mendukung penyusunan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa

- **Solusi**

- 1) Penguatan Database daerah dengan berbasis aplikasi
- 2) Menyusun Tools moitoring dan evaluasi
- 3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar SKPD
- 4) Integrasi Sistem Perencanaan daerah dengan Perencanaan desa
- 5) Revisi Peraturan bupati yang mengatur tentang kewenangan desa
- 6) Membangun aplikasi kemiskinan daerah yang terkoneksi dengan aplikasi TNP2K pusat dan kemensos.
- 7) Pemberdayaan pendamping desa dan pendamping lokal desa

d. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bonei, berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPEDA Kabupaten Bone Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. Total dukungan biaya kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 6.932.504.561,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Sedangkan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 6.280.234.794,- (Enam milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Atau sebesar 90,59%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Bappeda Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.280.234.794,- (90,59%)

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.235.379.716,- (87,17%)
- <u>Belanja Langsung</u>	<u>Rp. 4.044.855.078,- (92,60%)</u>
Jumlah	Rp. 6.280.234.794,- (89,88%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Bappeda terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Bappeda dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.235.379.716,- (87,17%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.955.409.710,
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 279.970.006,
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp 0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Bappeda Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.044.855.078,- (92,60%) dengan jumlah 14 program dan 43 kegiatan. Dengan rincian komponen sebagai berikut :

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	12.000.000,-	11.041.130,-	92,01	100
1.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.102.000,-	35.604.798,-	98,63	100
1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,-	6.960.000,-	99,22	100
1.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,-	4.465.000,-	99,97	100
1.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,-	29.990.000,-	99,97	100
1.23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	247.848.300,-	247.436.225,-	99,97	100
1.24	Pelaksanaan Administasi Perkantoran	85.278.200,-	85.278.200,-	100	100
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	59.500.000	59.500.000,-	100	100
02.10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	166.250.000,-	165.250.000,-	100	100
02.10	Pengadaan Mebeleur	8.000.000,-	8.000.000,-	100	100
02.22	Pengadaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.000.000,-	25.512.500,-	99,99	100
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional	81.661.600,-	77.970.416,-	95,48	100
02.06	Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta	25.512.500	25.512.500	100	100

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Perlengkapannya				
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.625.000,-	40.125.000,-	79,26	100
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.154.700,-	23.098.800,-	99,76	100
06.11	Penyusunan Renstra	44.065.000,-	34.870.000,-	79.13	100
15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen	39.900.000,-	39.759.020	99,65	100
15.10	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Daerah	124.700.000,-	123.725.000,-	88,99	100
15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	32.682.500,-	29.085.000,-	88,99	100
16.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	94.150.000,-	94.075.000,-	99,92	100
20.01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	94.150.000,-	94.075.000,-	99,92	100
21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	45.000.000,-	44.872.000,-	99,72	100
21.05	Penyusunan Rancangan RPJMD	472.230.000,-	472.068.086,-	99,97	100
21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	76.482.780,-	76.481.780,-	100	100
21.09	Penyelenggaraan Musrembang RKPD	214.733.444,-	212.943.594,-	99,17	100
21.11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	51.370.000,-	51.226.400,-	99,72	100

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pemb. Daerah	102.503.776,-	102.471.976,-	99,97	100
22.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	53.000.000,-	51.555.200,-	97,27	100
22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	124.000.000,-	121.849.200,-	98,27	100
22.06	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	232.187.500,-	228.275.250,-	89,32	100
22.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150.000.000,-	144.085.700,-	96,06	100
23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	166.759.500,-	165.945.179,-	99,51	100
23.05	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	181.986.500,-	181.418.400,-	99,69	100
23.06	Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bone	20.466.500,-	20.090.500,-	98,16	100
23.08	Koordinasi Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Gerakan Kembali Bersekolah	85.090.000,-	84.780.000,-	99,64	100
24.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	73.500.000,-	63.977.500,-	87,04	100
24.06	Koordinasi Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	201.425.000,-	184.360.646,-	91,53	100
24.06	Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Air Minum	63.575.000,-	58.852.400,-	92,57	100

Kode	Komponen	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	dan Sanitasi Berbasis Masyarakat				
24.07	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Irigasi yang Berbasis Masyarakat	318.160.000,-	108.430.000,-	34,08	40
24.08	Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman - PPSP	258.000.000,-	245.805.500,-	95,27	100

4. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 PENGHARGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK III KATEGORI KABUPATEN



BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Bappeda juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Bappeda Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 9 indikator memenuhi kriteria Baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bappeda untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Bappeda ke depan yaitu sinkronisasi antara Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Bagi instansi di lingkungan Bappeda sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

oleh instansi di lingkungan Bappeda untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

